

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester I 2024 (30 Juni 2024)

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615

Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514

e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode yang Semester I 2024 (30 Juni 2024)

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



IBFRI ENDO, S.H.I
NIP. 19710421 199603 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi.....	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	50
B.2. Belanja	51
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	51
C.1. Aset Lancar	51
C.2. Aset Tetap.....	52
C.3. Aset Lainnya	50
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	51
C.6. Ekuitas	52
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	53
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	53
D.2. Beban Pegawai	53
D.3. Beban Persediaan.....	54

D.4.	Beban Barang dan Jasa	54
D.5.	Beban Pemeliharaan	55
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	55
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	56
D.8.	Beban Bantuan Sosial	56
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	57
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	57
D.11.	Beban Lain-lain	58
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	58
D.13.	Pos Luar Biasa	59
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
E.1.	Ekuitas Awal	59
E.2.	Surplus (defisit) LO	59
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	59
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	59
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	60
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	60
E.3. 5	Koreksi Lain-lain.....	60
E.4.	Transaksi Antar Entitas	60
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	61
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	61
E.3.	Ekuitas Akhir	61
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	61
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	61
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	61
	Daftar dan Lampiran	63
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	64
	Daftar Hibah Langsung	67

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per Semester I (30 Juni 2024) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.H.I.

NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 30 Juni 2024 s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 928,918 atau mencapai 59 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1,568,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1,322,401,271 atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 2,705,174,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per Semester I (30 Juni 2024).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 9,830,913,341 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 19,858,153; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 9,811,055,188; Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 152,220,147 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 152,220,147 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 9,678,693,194.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 987,071 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1,606,973,877 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 1,605,986,806) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp.0 dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 1,605,986,806).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 9,945,838,897 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 1,605,986,806) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1,338,841,103 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 9,678,693,194.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2024			30 Juni 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,568,000	928,918	59	1,025,955
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,568,000	928,918	59	1,025,955
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1,565,161,000	862,141,776	55	756,214,624
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,140,013,000	460,259,495	40	520,449,997
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	10,000,000
	Jumlah Belanja Negara		2,705,174,000	1,382,772,729	49	1,286,654,621

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NERACA
PER 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)**

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	19,800,000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	58,153	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1. 3.	58,153	0
Jumlah Aset Lancar		19,858,153	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	4,045,410,000	4,045,410,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,39,548,443	2,919,698,443
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,229,115,000	6,229,115,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	25,401,979	25,401,979
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,428,420,234)	(3,272,748,525)
Jumlah Aset Tetap		9,811,055,188	9,946,876,897
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	4,510,000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	262,389,250	262,389,250
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(266,899,250)	(266,899,250)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		9,830,913,341	9,946,876,897
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	127,931,147	1,038,000
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	4,489,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	19,800,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		152,220,147	1,038,000
Jumlah Kewajiban		152,220,147	1,038,000
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		9,678,693,194	9,945,838,897
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9,830,913,341	9,946,876,897

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	987,071	1,084,108
Jumlah Pendapatan		987,071	1,084,108
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	963,672,923	950,087,060
Beban Persediaan	D. 3	17,693,700	17,357,300
Beban Barang dan Jasa	D. 4	264,354,995	266,081,497
Beban Pemeliharaan	D. 5	136,639,800	168,092,200
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	71,422,000	103,762,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	153,190,45	123,928,950
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		1,606,973,877	1,629,309,007
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1,605,986,806)	(1,628,224,899)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(1,605,986,806)	(1,628,224,899)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(1,605,986,806)	(1,628,224,899)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	9,945,838,897	9,909,013,307
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1,605,986,806)	(1,628,224,899)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1,338,841,103	1,285,628,666
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(267,145,703)	(342,596,233)
Ekuitas Akhir		9,678,693,194	9,566,417,074

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transpaaransi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp928,918*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 928,918 atau mencapai 59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1,568,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,568,000	928,918	59
	Total Pendapatan	1,568,000	928,918	59

Adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan pada 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung dan bangunan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 928,918 atau mencapai 59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1,568,000.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2024 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	928,918	1,025,955	97,037	9,5
	Total Pendapatan	928,918	1,025,955	97,037	9,5

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
1,322,401,271*

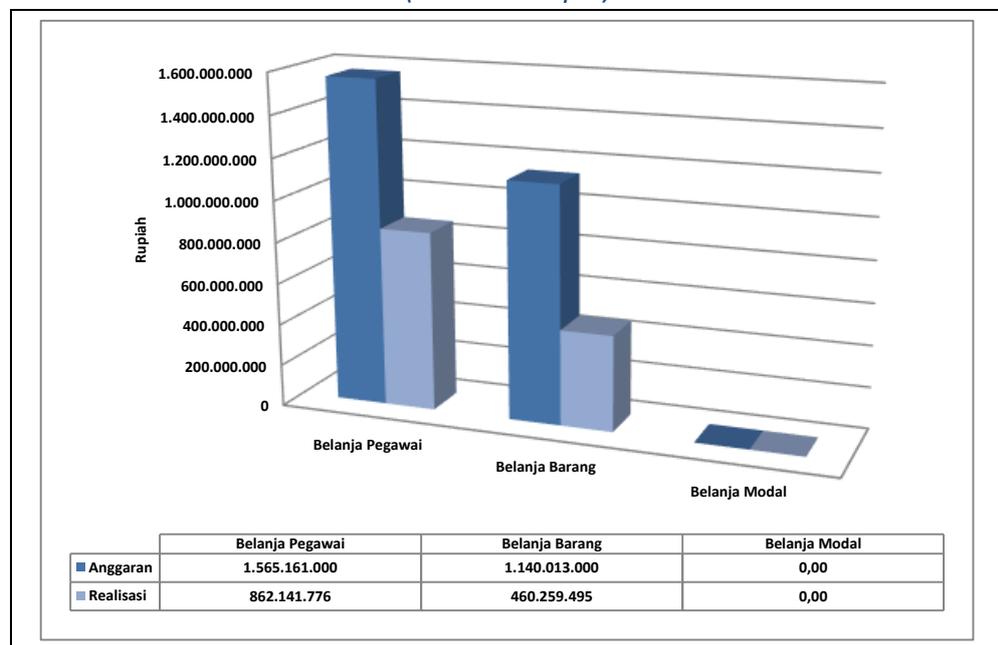
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1,322,401,271 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49% dari anggaran senilai Rp. 2,705,174,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,565,161,000	862,141,776	55
Belanja Barang	1,140,013,000	460,259,495	40
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	2,705,174,000	1,322,401,271	49
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	2,705,174,000	1,322,401,271	49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2023 & 2022

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1,322,401,271 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49% dari anggaran senilai Rp. 2,705,174,000. Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2024 dan

2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	862,141,776	756,204,624	105,937,152	14
Belanja Barang	460,259,495	520,449,997	(60,190,502)	(12)
Belanja Modal	0	10,000,000	(10,000,000)	(100)
Total Belanja	1,322,401,271	1,286,654,621	35,746,650	2,7

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
862,141,776*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 Dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 862,141,776 dan Rp. 756,204,624.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 862,141,776 dan Rp. 756,204,624. Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 8 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere, sehingga jumlah pegawai pada Tahun 2023 berkurang.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	347,452,660	294,880,340	52,572,320	18
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,953	5,722	1,231	22
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	23,220,874	20,471,464	2,749,410	13
Belanja Tunj. Anak PNS	5,483,028	4,629,680	853,348	18
Belanja Tunj. Struktural PNS	9,220,000	10,640,000	(1,420,000)	(13)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	337,860,000	299,770,000	38,090,000	13
Belanja Tunj. PPh PNS	49,850,705	33,014,694	16,836,011	51
Belanja Tunj. Beras PNS	17,815,320	15,642,720	2,172,600	14
Belanja Uang Makan PNS	40,850,000	39,170,000	1,680,000	4
Belanja Tunjangan Umum PNS	5,880,000	3,690,000	2,190,000	59
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	24,502,500	34,290,004	(9,787,504)	(29)
Total Belanja Brutto	862,142,040	756,204,624	105,937,416	(14)
Pengembalian Belanja	264	0	264	100
Total Belanja Netto	862,141,776	756,204,624	105,937,152	(14)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
460,259,495*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 460,259,495 dan Rp. 520,449,997.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 11,4 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Pemeliharaan
2. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan (Naik/ Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	264,492,495	257,014,997	7,477,498	(2,9)
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	6,848,000	12,286,500	(5,438,500)	(44)
Belanja Pemeliharaan	117,497,000	147,386,500	29,889,500	20
Belanja Perjalanan Dinas	71,422,000	103,762,000	(32,340,000)	(31)
Total Belanja Brutto	460,259,495	520,449,997	(60,190,502)	(12)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	460,259,495	520,449,997	(60,190,502)	(12)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 10,000,000.

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penghapusan barang belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2023 yang sebelumnya ada pada tahun 2022.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	10,000,000	(10,000,000)	(100)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Total Belanja Brutto	0	10,000,000	(10,000,000)	(100)
Pengembalian Belanja	0	10,000,000	(10,000,000)	(100)
Total Belanja Netto	0	10,000,000	(10,000,000)	(100)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
19,858,153

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 19,858,153 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	0
Piutang Bukan Pajak	58,153	0
Total Aset Lancar	19,858,153	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 19,800,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 19,800,000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	0
	Jumlah	19,800,000	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak:
Rp58,153

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 58,153 dan Rp. 0.

Piutang Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Piutang Bukan Pajak	58,153	0
	Jumlah	58,153	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
9,811,055,188

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 tersaji sebesar Rp 9,811,055,188 dan Rp. 9,946,876,897. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Perubahan (Naik/Turun)
1	Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,939,548,443	2,919,698,443	19,850,000
3	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979	0
	Jumlah	13,239,475,422	13,219,625,422	19,850,000
	Akumulasi Penyusutan	(3,428,420,234)	(3,272,748,525)	(155,671,709)
	Jumlah Aset Tetap	9,811,055,188	9,946,876,897	(135,821,709)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
4,045,410,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,045,410,000 dan Rp. 4,045,410,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	272	Hak Pakai Nomor 600	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		250,876,000
2	3	750	Hak Pakai Nomor 310	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		691,754,000
3	4	3,840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		3,102,780,000
				Jumlah		4,045,410,000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,045,410,000 dan Rp. 4,045,410,000. Jadi nilai aset tanah per 30 Juni 2024 adalah Rp. 4,045,410,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2,939,548,443*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,939,548,443 dan Rp. 2,919,698,443.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Peralatan dan Mesin	2,939,548,443	2,919,698,443
	Jumlah	2,939,548,443	2,919,698,443

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,939,548,443 dan Rp. 2,919,698,443. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
6,229,115,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 6,229,115,000 dan Rp. 6,229,115,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000
	Jumlah	6,229,115,000	6,229,115,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 6,229,115,000 dan Rp. 6,229,115,000. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
25,401,979*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.

25,401,979 dan Rp. 25,401,979.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979
	Jumlah	25,401,979	25,401,979

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp
(3,428,420,234
)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp (3,428,420,234) dan Rp. (3,272,748,525).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,939,548,443	(2,597,875,387)	341,673,056
2	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	(830,544,847)	5,398,570,153
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	(0)	25,401,979
	Jumlah	9,174,215,422	(3,272,748,525)	5,765,645,188

Aset Lainnya:
Rp 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 = dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
2	Aset Lain-lain	262,389,250	262,389,250
3	Aset Lainnya yang belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	266,899,250	266,899,250
	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(266,899,250)	(266,899,250)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp 4,510,000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian Aset tak berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Aset Tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
	Jumlah	4,510,000	4,510,000

Saldo aset tak berwujud per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,000. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2023.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 262,389,250

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.

262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2024	262,389,250
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2023	262,389,250

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset lain-lain merupakan barang milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional. Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp 152,220,147*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 152,220,147 dan Rp. 1,038,000. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Utang kepada Pihak Ketiga	127,931,147	1,038,000
2	Utang yang Belum Ditagihkan	4,489,000	0
3	Uang Muka dari KPPN	19,800,000	0
	Jumlah	152,220,147	1,038,000

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 127,931,147*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 127,931,147 dan Rp. 1,038,000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Utang kepada Pihak Ketiga	127,931,147	1,038,000
	Jumlah	127,931,147	1,038,000

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang
Belum
Ditagihkan::
Rp. 4,489,000

Jumlah utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,489,000 dan Rp. 0.

Adapun rincian utang yang belum ditagihkan Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Utang yang Belum Ditagihkan	6,341,000	0
	Jumlah	6,341,000	0

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.19,800,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 19,800,000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Uang Muka dari KPPN	19,800,000	0
	Jumlah	19,800,000	0

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp
9,678,693,194

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 9,678,693,194 dan Rp 9,945,838,897. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2024 terdapat peningkatan nilai Kewajiban sebesar (Rp. 151,182,147) (14,564.75%) dari nilai per TA 2022. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir

tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 9,678,693,194 sedangkan per TA 2022 tercatat sebesar Rp. 9,945,838,897.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp
987,071

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 987,071 dan Rp 1,084,108. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,568,000	987,071	32
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		1,568,000	987,071	32

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
963,672,923

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 963,672,923 dan Rp. 950,087,060. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	389,274,260	385,389,700	3,884,560	1
Beban Pembulatan Gaji PNS	7,465	7,271	194	2,7
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	26,019,884	26,329,428	(309,544)	(1,2)
Beban Tunj. Anak PNS	6,187,252	5,838,120	349,132	(6)
Beban Tunj. Struktural PNS	10,250,000	13,680,000	(3,430,000)	(25)
Beban Tunj. Fungsional PNS	381,450,000	371,790,000	9,660,000	2,6

Beban Tunj. PPh PNS	54,478,642	43,734,937	10,743,705	24,5
Beban Tunj. Beras PNS	19,987,920	20,277,600	(289,680)	(1,4)
Beban Uang Makan PNS	40,850,000	39,170,000	1,680,000	4
Beban Tunjangan Umum PNS	6,615,000	5,530,000	1,085,000	20
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	28,552,500	38,340,004	(9,787,504)	(25,5)
Total Beban Brutto	963,672,923	950,087,060	13,585,863	1,4
Pengembalian Beban	0	0	0	0
Total Beban Netto	963,672,923	950,087,060	13,585,863	1,4

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp. 17,693,700*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 17,693,700 dan Rp. 17,357,300. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	17,693,700	17,357,300	336,400	2
Beban Persediaan Pita Cukai, Materei dan Leges	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	17,693,700	17,357,300	336,400	2

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
Jasa : Rp.
264,354,995*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 264,354,995 dan Rp. 266,081,497. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	205,542,995	191,280,997	14,261,998	7,46
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	616,000	509,500	106,500	20,9
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29,965,000	20,100,000	9,865,000	49
Beban Operasional Lainnya	4,002,500	2,171,000	1,831,500	84,4
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,556,000	0	5,556,000	100

Beban Sewa	13,478,500	15,725,000	2,246,500	14,3
Beban Langganan Telepon	5,194,000	5,173,000	21,000	0,4
Beban Barang Operasional – Penanganan COVID-19	0	801,000	(801,000)	(100)
Beban Langganan Listrik	0	24,746,000	(24,746,000)	(100)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,575,000	(5,575,000)	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	264,354,995	266,081,497	(1,726,502)	(0.649)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp.
136,639,800

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 136,639,800 dan Rp. 168,092,200. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,420,000	105,464,000	(39,044,000)	(37)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,602,000	32,913,000	8,689,000	26,4
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	23,802,000	27,000,000	(3,198,000)	(11,8)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	4,815,800	2,715,200	5,100,600	187,85
Total Beban Pemeliharaan	136,639,800	168,092,200	(31,452,400)	(18.711)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp.
71,422,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 71,422,000 dan Rp. 103,762,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	71,422,000	103,762,000	(32,340,000)	(31.167)

Total Beban Perjalanan Dinas	71,422,000	103,762,000	(32,340,000)	(31.167)
------------------------------	------------	-------------	--------------	----------

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0

Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 153,190,459

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 153,190,459 dan Rp. 123,928,950. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	77,686,382	44,574,873	33,111,509	74,28
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75,504,077	75,504,077	0	0
Jumlah Penyusutan	153,190,459	123,928,950	29,261,509	23,61
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	153,190,459	123,928,950	29,261,509	23.612

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari	0	0	0	0

kegiatan Non Operasional

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,945,838,897 dan Rp. 9,909,013,307.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. (1,605,986,806) dan Rp. (1,628,224,899). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2023 dan 31 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,338,841,103 dan Rp. 1,285,628,666.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(928,918)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,322,401,271
Transfer Masuk	17,368,750
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	1,338,841,103

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp. (928,918) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1,322,401,271.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas. Pada Periode hingga 30 Juni 2024, Transfer Masuk sebesar Rp 17,368,750 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp. 0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,678,693,194 dan Rp. 9,566,417,074.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan S-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Pembuat Komitmen : Abdullah, S.H, M.H.

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Achmad Hanif, S.Kom.

Bendahara : Hamzah Usman

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Maumere
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
				Saldo Awal	Beban Penyusutan	Total	Per 30 Juni 2024
A.	Tanah	4,862	4,045,410,000	0	0	0	4,045,410,000
1.	Tanah Persil	4,862	4,045,410,000	0	0	0	4,045,410,000
B.	Peralatan dan Mesin	366	2,939,548,443	(2,517,707,755)	(80,167,632)	(2,597,875,387)	341,673,056
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	390,018,828	(390,018,828)	0	(390,018,828)	0
2.	Alat Kantor	79	283,789,000	(283,789,000)	0	(283,789,000)	0
3.	Alat Rumah Tangga	194	1,141,321,796	(1,101,819,338)	(4,389,162)	(1,106,208,500)	35,113,296
4.	Alat Studio	9	67,817,820	(16,463,382)	(6,381,782)	(22,845,164)	44,972,656
5.	Alat Komunikasi	2	12,129,700	(12,129,700)	0	(12,129,700)	0
6.	Peralatan Pemancar	4	153,199,999	(70,699,999)	(7,500,000)	(78,199,999)	75,000,000
7.	Komputer Unit	50	673,835,910	(464,474,191)	(43,912,115)	(508,386,306)	165,449,604
8.	Peralatan Komputer	22	217,435,390	(178,313,317)	(17,984,573)	(196,297,890)	21,137,500
C.	Gedung dan Bangunan	6	6,229,115,000	(755,040,770)	(75,504,077)	(830,544,847)	5,398,570,153
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	5,006,257,000	(614,761,720)	(61,476,172)	(676,237,892)	4,330,019,108
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	785,775,000	(92,444,120)	(9,244,412)	(101,688,532)	684,086,468
3.	Tugu/Tanda Batas	2	437,083,000	(47,834,930)	(4,783,493)	(52,618,423)	384,464,577
D.	Aset Tetap Lainnya	465	25,401,979	0	0	0	25,401,979
1.	Barang Perpustakaan Tercetak	463	25,201,979	0	0	0	25,201,979
2.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2	200,000	0	0	0	200,000
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	144	262,389,250	(262,389,250)	0	(262,389,250)	265,950,168
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	5,118,000	(5,118,000)	0	(5,118,000)	0
2.	Alat Kantor	35	29,723,000	(29,723,000)	0	(29,723,000)	0

3.	Alat Rumah Tangga	71	56,347,250	(56,347,250)	0	(56,347,250)	0
4.	Alat Studio	2	20,800,000	(20,800,000)	0	(20,800,000)	0
5.	Alat Komunikasi	11	21,367,000	(21,367,000)	0	(21,367,000)	0
6.	Peralatan Pemancar	2	4,875,000	(4,875,000)	0	(4,875,000)	0
7.	Komputer Unit	9	71,700,000	(71,700,000)	0	(71,700,000)	0
8.	Peralatan Komputer	12	52,009,000	(52,009,000)	0	(52,009,000)	0
9.	Peralatan Olah Raga	1	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
	Jumlah	5,843	13,501,864,672	(3,535,137,775)	(155,671,709)	(3,690,809,484)	9,811,055,188

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Maumere
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
			Jumlah :				